

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT *Kabupaten Trenggalek* 2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT *Kabupaten Trenggalek* 2022



INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KABUPATEN TRENGGALEK 2022

Nomor Publikasi : 35030.2301
Katalog BPS : 4102004.3503
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : xii + 50 halaman

Naskah:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Gambar Kulit dan Tata Letak:

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Gambar Kulit dan Tata Letak :

Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Diterbitkan Oleh :

©Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik.

TIM PENYUSUN

Penanggungjawab Umum

Emil Wahyudiono, S.ST, M.Si

Penyunting

Sjamsudin, SE.

Penulis

Wenthy Oktavin Mayasari, A.Md

Desain Cover dan Tata Letak

Wenthy Oktavin Mayasari, A.Md

KATA PENGANTAR

Tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah menyelenggarakan program-program pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, terarah dan terpadu. Dalam pelaksanaannya diperlukan indikator-indikator yang dapat mencerminkan taraf kesejahteraan rakyat.

Publikasi “Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Trenggalek 2022” ini menyajikan indikator-indikator yang dimaksud. Data yang digunakan berasal dari BPS yang bersumber dari hasil pelaksanaan Susenas, Sakernas dan hasil Sensus Penduduk.

Harapan kami semoga kehadiran publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pengguna data, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek, dalam melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi program pembangunan kesejahteraan rakyat.

Akhir kata, terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan publikasi indikator kesejahteraan rakyat ini.

Trenggalek, Desember 2022
Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Trenggalek



Emil Wahyudiono

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I KEPENDUDUKAN	1
1.1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin	2
1.2. Angka Beban Ketergantungan	3
1.3. Fertilitas dan Keluarga Berencana	5
BAB II KESEHATAN	11
2.1. Derajat dan Status Kesehatan Penduduk	12
2.2. Pemanfaatan Tenaga dan Fasilitas Kesehatan	14
BAB III PENDIDIKAN	17
3.1. Angka Melek Huruf	18
3.2. Rata-rata Lama Sekolah	19
3.3. Tingkat Pendidikan	20
3.4. Tingkat Partisipasi Sekolah	22
BAB IV KETENAGAKERJAAN	25
4.1. Karakteristik Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek	26
4.2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	28
BAB V TARAF DAN POLA KONSUMSI	31
5.1. Rata-rata Pengeluaran Per Kapita	32
BAB VI PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN	35
6.1. Kualitas Tempat Tinggal	36
6.2. Fasilitas Tempat Tinggal	38
6.3. Status Kepemilikan Tempat Tinggal	39
BAB VII KEMISKINAN	41
7.1. Perkembangan Penduduk Miskin di Trenggalek	42

7.2	Karakteristik Kemiskinan	43
BAB VIII	SOSIAL LAINNYA	47
8.1	Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi	47
8.2	Kredit Usaha dan Program Perlindungan Sosial	48

<https://trenggalekkab.bps.go.id>



1. KEPENDUDUKAN

Isu kependudukan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk. Penduduk menjadi modal dasar dalam pembangunan. Namun, di sisi lain penduduk juga dapat menjadi hambatan dalam mencapai tujuan pembangunan. Hal ini terjadi apabila pertumbuhan jumlah penduduk tidak terkendali dan tidak diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan penduduk seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan akan pendidikan dan kesehatan yang layak.

Pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat mengganggu kesejahteraan penduduk. Penyediaan pangan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan terjadinya kelaparan dan dapat meningkatkan jumlah kematian penduduk. Selain itu, ketersediaan pemukiman yang tidak mencukupi dapat mengakibatkan munculnya pemukiman-pemukiman liar, kumuh, dan tidak layak akibat sempitnya lahan untuk pemukiman seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Masalah lain yang dapat muncul diantaranya terjadinya gangguan keamanan akibat maraknya aksi tindakan kriminalitas, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat akibat sarana kesehatan yang kurang memadai, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia terkait dengan sarana pendidikan yang terbatas.

Selain tingkat pertumbuhan penduduk, masalah komposisi penduduk dan ketimpangan distribusi penduduk juga menjadi masalah

serius yang harus segera ditangani oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan baik dalam hal kuantitas maupun kualitas penduduk harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan.

1.1. Jumlah, Pertumbuhan Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin

Salah satu masalah klasik kependudukan yang terjadi sekarang ini dan terus menjadi perhatian pemerintah jumlah penduduk yang besar. Berdasarkan hasil proyeksi dasar Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015), jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek mengalami kenaikan sekitar 37.288 jiwa dari tahun 2020 yang mencapai 697.600 jiwa menjadi 734.888 jiwa di tahun 2021. Apabila dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, jumlah penduduk Trenggalek saat ini mengalami peningkatan. Dengan kata lain, selama kurun waktu tiga tahun terakhir jumlah penduduk Trenggalek telah mengalami penambahan penduduk sebesar 39.986 jiwa. Penduduk Kabupaten Trenggalek menjadi potensi sekaligus modal bagi pembangunan jika didukung dengan kualitas yang memadai.

Laju pertumbuhan penduduk Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 0,51. Angka ini menurun dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 0,81. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk di Trenggalek menunjukkan adanya keberhasilan.

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk (jiwa)	694 902	696 295	697 600	734 888
• Laki-laki (jiwa)	345 282	346 008	346 577	369 196
• Perempuan (jiwa)	349 620	350 287	351 023	365 692
Laju Pertumbuhan Penduduk	0,26	0,20	0,81	0,51
Rasio Jenis Kelamin	98,76	98,78	98,73	98,74

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek 2018-2021

Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 sebesar 98,74. Ini berarti bahwa dari setiap 100 penduduk perempuan terdapat sekitar 98 penduduk laki-laki. Angka rasio jenis kelamin Kabupaten Trenggalek dari tahun 2018 – 2021 selalu di bawah 100. Dengan kata lain, jumlah penduduk laki-laki di Trenggalek lebih sedikit daripada jumlah penduduk perempuan.

1.2 Angka Beban Ketergantungan

Angka ketergantungan (Dependency Ratio) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Angka ini menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) atas penduduk usia tidak produktif (14 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase angka ketergantungan, maka semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk belum produktif dan sudah tidak produktif lagi.

Sebaliknya, semakin rendah angka ketergantungan, maka semakin rendah pula beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan sudah tidak produktif lagi.

Dampak keberhasilan pembangunan kependudukan juga dapat dilihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur seperti tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan. Hal ini disebabkan dengan semakin kecilnya angka beban ketergantungan akan memberikan kesempatan yang semakin besar bagi penduduk usia produktif untuk meningkatkan kualitas dirinya.

Tabel 1.2 Komposisi Penduduk dan Angka Beban Ketergantungan di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kelompok Umur				
• 0 - 14 (jiwa)	141 533	151 764	138 753	140 270
• 15 - 64 (jiwa)	478 428	476 472	479 600	511 676
• 65+ (jiwa)	74 941	68 059	79 247	82 942
• Jumlah (jiwa)	694 902	696 295	697 600	734 888
Angka Ketergantungan	45,25	45,33	45,48	45,53

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Selama periode 2018 – 2021 angka beban ketergantungan berfluktuasi dengan perbedaan yang tidak terlalu signifikan. Pada tahun 2021, angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek sebesar 45,53. Hal ini berarti dari 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 45 penduduk usia tidak produktif. Jika dilihat pada Tabel 1.2, terlihat bahwa angka ketergantungan Kabupaten Trenggalek pada tahun 2020 lebih

rendah dibandingkan pada tahun 2021. Hal ini mengindikasikan pengendalian penduduk yang baik sehingga adanya perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin pada semakin rendahnya angka beban ketergantungan.

Pada Tabel 1.2 juga dapat dilihat bahwa struktur umur penduduk Trenggalek masih didominasi oleh penduduk usia produktif. Proporsi penduduk usia produktif mengalami sedikit penurunan pada tahun 2019. Masih dominannya proporsi penduduk usia produktif di Kabupaten Trenggalek menjadi sangat potensial sebagai modal dasar untuk pembangunan.

1.3 Fertilitas dan Keluarga Berencana

Kelahiran (fertilitas) merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi besarnya penduduk di suatu wilayah selain kematian (mortalitas) dan perpindahan penduduk (mobilitas). Angka fertilitas yang tinggi apabila disertai angka mortalitas yang rendah akan menyebabkan penambahan penduduk yang meningkat. Apabila angka fertilitas tidak dapat terkendali maka akan menyebabkan terjadinya ledakan penduduk sehingga menyebabkan jumlah penduduk semakin membengkak dan memicu berbagai macam permasalahan penduduk di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Di samping itu, ledakan penduduk yang terjadi akan menjadi beban negara semakin besar dan beresiko menghambat pembangunan nasional.

Tabel 1.3 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15-49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
15-19	1,91	3,32	0,89	2,64
20-24	11,53	10,26	9,72	9,98
25-29	15,76	14,88	15,62	16,42
30-34	16,18	15,92	15,99	16,49
35-39	17,34	18,39	18,43	17,62
40-44	19,22	19,70	20,22	18,81
45-49	17,94	17,53	19,12	18,05
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Perempuan berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin di Trenggalek pada tahun 2018 – 2021 didominasi oleh perempuan kelompok umur 40 – 44 tahun. Pada tahun 2018, perempuan yang berstatus kawin pada kelompok umur 40 – 44 tahun sebesar 19,22 persen dan pada tahun 2019 sebesar 19,70 persen. Adapun pada tahun 2021, persentase perempuan yang berstatus kawin pada kelompok umur 40 – 44 tahun turun dari 20,22 menjadi 18,81 persen.

Angka kelahiran (fertilitas) sangat dipengaruhi oleh usia perkawinan pertama perempuan dan angka prevalensi Keluarga Berencana (KB). Usia perkawinan pertama seorang perempuan berpengaruh terhadap resiko melahirkan karena semakin muda usia perkawinan pertama, maka semakin besar resiko keselamatan ibu maupun anak selama masa kehamilan maupun saat melahirkan.

Tabel 1.4 Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas yang Pernah Kawin Menurut Umur Perkawinan Pertama dan Rata-rata Umur Perkawinan Pertama di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	
Usia Perkawinan Pertama (%)				
• < 17 Tahun	22,41	22,25	17,86	25,10
• 17-18	23,61	25,44	25,18	27,27
• 19-24	44,43	44,79	46,11	38,87
• 25 +	9,56	7,52	10,84	8,75
Rata-rata Usia Perkawinan Pertama (Tahun)	19,41	19,25	19,60	19,01

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Pada tahun 2018 dan 2019, terdapat lebih dari 22 persen perempuan di Kabupaten Trenggalek yang menikah pada usia kurang dari 17 tahun. Angka ini mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sekitar 17 persen. Namun pada tahun 2021 mengalami kenaikan lagi sebesar 25,10 persen. Perkawinan pada usia muda memberikan peluang lebih besar untuk memiliki anak lebih banyak mengingat masa reproduksinya yang relatif panjang, apalagi jika tidak memiliki perencanaan keluarga yang baik. Oleh karena itu, perlu peningkatan akses program Keluarga Berencana pada kelompok usia tersebut.

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu. Dari program KB ini diharapkan cakupan akseptor KB terus meningkat terutama untuk

kepesertaan KB dengan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) seperti IUD dan implant, sehingga laju pertumbuhan penduduk bisa dikendalikan lebih baik lagi.

Berdasarkan masa kerjanya, kontrasepsi dibedakan menjadi dua kelompok yaitu sementara (*reversible*) dan permanen. Pilihan kontrasepsi untuk menunda kehamilan pertama dan mengatur jarak kehamilan adalah kontrasepsi yang memiliki masa kerja bersifat sementara, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan, frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan resiko efek samping terhadap kesehatan pemakai, serta memberikan kenyamanan bagi penggunanya.

Data Susenas menunjukkan bahwa persentase wanita berumur 15 – 49 tahun yang berstatus kawin yang sedang menggunakan alat/cara KB pada tahun 2018 – 2021 sudah mencapai di atas 50 persen yaitu masing masing sebesar 57,16 persen pada tahun 2018; 65,50 persen pada tahun 2019; 56,27 persen pada tahun 2020 dan 64,84 persen pada tahun 2021.

Tabel 1.5 Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun dan Berstatus Kawin yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi Menurut Jenis Alat Kontrasepsi, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Wanita yang Sedang Menggunakan Alat/Cara Kontrasepsi	57,16	65,50	56,27	64,84
Alat Kontrasepsi yang digunakan				
• MOW/Tubektomi	6,65	4,24	4,79	5,64
• MOP/Vasektomi	0,37	0,00	2,32	0,00
• AKDR/IUD/Spiral	7,19	5,37	5,15	6,75
• Suntikan KB	44,02	41,85	39,69	49,15
• Susuk KB/Norplan/Implan/Alwalit	10,00	7,62	9,08	7,20
• Pil KB	26,18	33,25	24,09	25,96
• Kondom	2,51	1,05	7,20	1,99
• Intravag/Kondom Wanita	0,00	0,00	0,00	0,00
• Tradisional	3,09	6,62	7,68	3,30

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Berdasarkan Tabel 1.5, terlihat bahwa suntikan dan pil merupakan alat kontrasepsi yang paling banyak diminati. Pada tahun 2018, penggunaan suntikan mencapai 44,02 persen dan menjadi 49,15 persen pada tahun 2021. Sementara itu, penggunaan pil mengalami kenaikan sebesar 24,09 persen pada tahun 2020 menjadi 25,96 persen pada tahun 2021.



2. KESEHATAN

Tingkat kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu wilayah. Apabila semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu negara/wilayah, khususnya dalam meningkatkan tingkat produktifitas. Berkaitan dengan pembangunan kesehatan, pemerintah sudah melakukan berbagai program kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya memberikan kemudahan akses pelayanan publik bidang kesehatan seperti puskesmas yang sasaran utamanya menurunkan angka kesakitan masyarakat, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, menurunkan prevalensi gizi buruk dan gizi kurang, serta meningkatkan Angka Harapan Hidup.

Upaya pemerintah melalui program-program pembangunan yang telah dilakukan diantaranya meningkatkan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkualitas, merata dan terjangkau, yaitu dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi penduduk miskin; menyediakan sumber daya kesehatan yang kompeten; mendistribusikan tenaga kesehatan secara merata ke seluruh wilayah; meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan melalui pembangunan puskesmas,

rumah sakit, polindes, dan posyandu; serta menyediakan obat-obatan yang terjangkau oleh masyarakat.

Keberhasilan atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam bidang kesehatan dapat diukur dengan beberapa indikator kesehatan antara lain Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi dan indikator lain yang berkaitan dengan akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan seperti persentase balita yang persalinannya ditolong oleh tenaga medis dan persentase penduduk yang berobat jalan ke rumah sakit, dokter/klinik, puskesmas, dan lainnya.

2.1 Derajat dan Status Kesehatan Penduduk

Derajat kesehatan penduduk dapat dilihat dari angka kesakitan (morbiditas). Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS, morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga, maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya, keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dan lain-lain. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan mengindikasikan rendahnya derajat kesehatan di wilayah tersebut dan menunjukkan angka kesakitan yang tinggi di wilayah tersebut.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan dan Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2021

Jenis Kelamin	Mengalami Keluhan Kesehatan		Angka Kesakitan	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Laki-laki	32,99	18,78	17,09	7,47
Perempuan	34,82	22,84	17,54	7,77
Total	33,91	20,82	17,31	7,62

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2020, 2021

Tabel 2.1 menunjukkan penduduk Trenggalek yang mengalami keluhan kesehatan pada tahun 2020 mencapai 33,91 persen. Kondisi ini mengalami penurunan pada tahun 2021 sebesar 13,09 persen. Keluhan kesehatan penduduk perempuan lebih tinggi dari penduduk laki-laki baik pada tahun 2020 maupun 2021.

Dari Tabel 2.1 juga terlihat bahwa angka kesakitan di Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sebanyak 7,62 persen dari total penduduk di Kabupaten Trenggalek mengakui bahwa mengalami keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan selama sebulan terakhir di tahun 2021. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 17,31 persen.

Penurunan angka kesakitan ini menunjukkan bahwa ada peningkatan kesehatan yang dialami penduduk Kabupaten Trenggalek. Adanya peningkatan kesehatan ini, maka dapat menunjukkan bahwa

adanya peningkatan kualitas di bidang kesehatan di Kabupaten Trenggalek.

2.2 Pemanfaatan Tenaga dan Fasilitas Kesehatan

Untuk menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) salah satunya adalah dengan meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga medis dan meningkatkan pelayanan neonatal. Penolong persalinan yang ideal adalah tenaga medis karena mereka telah menerapkan proses persalinan yang memenuhi standar kesehatan. Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk memperluas akses, sarana pelayanan, dan tenaga kesehatan dengan cara meningkatkan jumlah maupun kualitasnya.

Tabel 2.2 Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 15-29 Tahun Menurut Penolong Kelahiran Terakhir pada Anak Lahir Hidup Terakhir di Kabupaten Trenggalek, 2022

Uraian	2020	2021
(1)	(2)	(2)
Dokter Kandungan	41,71	37,35
Dokter Umum	0,00	2,46
Bidan	51,43	60,19
Perawat	5,47	0,00
Dukun Beranak	0,00	0,00
Lainnya	1,40	0,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021

Perkembangan anak pada masa balita akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang saat mereka tumbuh menjadi manusia dewasa. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan balita dimulai dari kesehatan ibu, tenaga penolong pada saat lahir, pemberian ASI, dan imunisasi. Keselamatan bayi dan ibu yang melahirkan selalu berkaitan

dengan penolong persalinan yang membantu proses kelahiran tersebut. Dalam proses kelahiran penolong terbaik kelahiran adalah tenaga medis (dokter, bidan, perawat, tenaga kesehatan lain) atau orang yang sudah dibekali pengetahuan dan kemampuan persalinan. Usaha pemerintah dalam menyediakan tenaga kesehatan ternyata memperlihatkan hasil yang baik, dimana penolong persalinan didominasi oleh dokter kandungan dan bidan, yaitu masing-masing sebesar 37,35 persen dan 60,19 persen.

Penyediaan fasilitas kesehatan tak kalah pentingnya dengan peran tenaga kesehatan dalam mendukung kesehatan penduduk. Pada umumnya, pemanfaatan fasilitas kesehatan oleh penduduk sangat erat terkait dengan kondisi sosial ekonomi penduduk dan kondisi wilayah tempat tinggal mereka berada. Dampak perbedaan kualitas kesehatan yang nyata antara penduduk di perdesaan dengan penduduk perkotaan ini dapat disebabkan oleh perbedaan ketersediaan dan jarak menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan tersebut, ditambah lagi perilaku penduduk itu sendiri. Tingginya persentase penduduk di daerah perkotaan yang memanfaatkan berobat ke praktek dokter/klinik mengingat lebih mudahnya akses dan kualitas pelayanannya jauh lebih baik dibandingkan dengan di daerah perdesaan.

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa kondisi penduduk yang berobat ke pelayanan kesehatan dengan tenaga ahli kesehatan yang terlatih mengalami peningkatan yang sangat nyata dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Terjadinya pergeseran dan perubahan penduduk yang berobat dari tenaga kesehatan yang kurang/tidak

terlatih/tradisional menuju ke tenaga kesehatan yang terlatih secara medis memperlihatkan meningkatnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat secara keseluruhan akan pentingnya kesehatan, juga merupakan indikator meningkatnya kondisi sosial ekonomi suatu wilayah bahkan negara.

Tabel 2.3 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan Menurut Tempat Berobat di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
RS Pemerintah	5,62	8,01	6,29	8,98
RS Swasta	0,76	2,22	1,42	1,73
Praktik Dokter/Bidan	60,13	56,52	60,68	59,47
Klinik/Praktik Dokter Bersama	14,45	10,79	12,35	18,63
Puskesmas/Pustu	22,12	19,87	21,95	9,87
UKBM	1,48	3,26	1,85	1,56
Praktek Pengobatan Tradisional/Alternatif	1,26	1,43	1,13	2,18
Lainnya	0,45	4,97	2,03	3,79
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Pada tahun 2021, tempat praktik dokter/bidan mempunyai peran paling besar dalam membantu penduduk mendapatkan pelayanan kesehatan dimana sekitar 59,47 persen berobat jalan di tempat ini, disusul klinik/praktik dokter bersama dengan 18,63 persen. Sementara itu, penduduk yang berobat jalan di rumah sakit hanya sekitar 10,71 persen yang terdiri dari rumah sakit pemerintah sebesar 8,98 persen dan rumah sakit swasta sebesar 1,73 persen.



3. PENDIDIKAN

Di era globalisasi modern saat ini, perkembangan di segala bidang keilmuan semakin pesat. Dari berbagai perkembangan ilmu pengetahuan tersebut, salah satu yang menjadi perhatian para ilmuwan adalah mengenai konsep pembangunan. Paradigma baru mengenai konsep pembangunan ini dipicu oleh kegagalan konsep pembangunan era sebelum tahun 1970-an yang menitikberatkan pembangunan hanya pada pertumbuhan ekonomi saja. Namun, pada kenyataannya pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dipandang dari aspek ekonomi saja, tetapi juga dari aspek sosial lainnya, salah satunya adalah aspek pendidikan.

Pendidikan merupakan cikal bakal dari terbentuknya kualitas sumber daya manusia yang handal. Pendidikan yang baik akan melahirkan generasi penerus bangsa yang cerdas dan kompeten. Oleh karena itu, pendidikan juga merupakan salah satu faktor penting kewibawaan sebuah negara di mata dunia internasional.

Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui bidang pendidikan telah lama dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Pembangunan pendidikan di Indonesia sejak tahun 1980-an ditempuh melalui empat kebijakan pokok yaitu memperoleh kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan, efisiensi manajemen pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia

dini sampai dengan usia lanjut.

Memasuki tahun era tahun 1990, pendidikan Indonesia menekankan pada pengembangan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan masa depan melalui pelaksanaan wajib belajar 9 tahun yang ditunjang dengan program kejar paket. Sebagai tindak lanjut dari keseriusan pemerintah di bidang pendidikan, maka diterbitkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan bahwa anggaran pendidikan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari total anggaran belanja.

Pembahasan mengenai indikator bidang pendidikan di Kabupaten Trenggalek menjadi penting untuk melihat sejauh mana capaian di bidang pendidikan sekaligus mengidentifikasi tantangan ke depan sebagai bahan evaluasi pemerintah dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakatnya.

3.1 Angka Melek Huruf

Secara harfiah, angka melek huruf menunjukkan berapa besar proporsi penduduk pada usia tertentu yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya. Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dengan huruf latin dan berhitung dengan angka arab dalam kegiatannya memerlukan kecakapan tersebut dan juga memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung untuk pengembangan diri dan masyarakat.

Tabel 2.3 Angka Melek Huruf (Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas) di Kabupaten Trenggalek , 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Melek Huruf	94,25	95,06	95,03	94,69

Sumber: BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Tabel 2.3 memperlihatkan bahwa angka melek huruf penduduk Kabupaten Trenggalek usia 10 tahun ke atas pada tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, angka melek huruf sebesar 94,69 atau terdapat sebesar 5,31 persen penduduk Kabupaten Trenggalek usia 10 tahun ke atas yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Dengan kata lain, 1 dari 20 orang penduduk Kabupaten Trenggalek yang tidak dapat membaca dan menulis huruf latin/lainnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek diharapkan dapat menciptakan sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk Kabupaten Trenggalek memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran

3.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam hal mengenyam pendidikan formal di suatu wilayah. Indikator rata-rata lama sekolah sangat penting karena

digunakan sebagai salah satu ukuran untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM) khususnya pada dimensi pendidikan.

Tabel 3.2 Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Trenggalek , 2018 – 2020

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
(1)	(2)
2018	7,76
2019	7,63
2020	8,00
2021	7,97

Sumber: BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 mencapai 7,97 tahun. Dapat dikatakan bahwa secara rata-rata, penduduk yang berusia 15 tahun ke atas mengenyam bangku pendidikan sekolah selama 7,79 tahun atau setara dengan kelas VIII tingkat SMP. Capaian ini masih dibawah target pemerintah dengan program wajib belajar 9 tahun. Namun demikian, jika dibandingkan dengan tahun 2020 dan 2021 seperti yang terlihat di Tabel 3.2, rata-rata lama sekolah Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan meskipun sempat sedikit naik pada tahun 2020.

3.3 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan merupakan indikator pokok kualitas pendidikan formal. Seseorang yang menamatkan pendidikannya hingga jenjang yang tinggi mempunyai pengetahuan yang luas serta keterampilan/keahlian

yang tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mewajibkan semua warga negara Indonesia untuk menyelesaikan pendidikan dasar dengan program wajib belajar 9 tahun (6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP).

Tabel 3.3 Persentase Tingkat Pendidikan Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Trenggalek, 2022

Uraian	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Tidak punya ijazah SD	7,65	11,22	9,42
SD/MI/Paket A	36,55	33,07	34,83
SMP/MTs/Paket B	27,13	27,10	27,11
SMA/MA/Paket C	21,65	21,31	21,48
SMK/MAK	1,12	1,22	1,17
D1/D2/D3	0	0	0
Profesi	5,65	6,08	5,86
D4/S1 ke atas	0,26	0	0,13
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2022

Secara umum, tingkat pendidikan di Kabupaten Trenggalek tidak begitu tinggi. Mayoritas penduduk Kabupaten Trenggalek hanyalah lulusan SD/ sederajat saja. Program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah dirasakan belum optimal. Hal ini terlihat dari persentase penduduk usia 15 tahun ke atas dengan lulusan SMA/MA/Paket C keatas sebesar 28,64 persen dengan rincian tamat SMA/MA/Paket C sebesar 21,48 persen, tamat SMK/MAK sebesar 1,17, tamat profesi dan tamat sarjana ke atas (S1/D4/S2/S3) masing- masing sebesar 5,86 persen dan 0,13 persen. Bila ditinjau dari jenis kelaminnya, penduduk laki-laki usia 15 tahun ke atas yang mempunyai ijazah SMA/

MA/Paket C ke atas sebanyak 28,68 persen, dimana 0,26 persen merupakan lulusan D4/S1 keatas. Kondisi ini lebih baik daripada penduduk perempuan dengan pendidikan SMA/MA/Paket C ke atas sekitar 28,61 persen, dimana 0,13 diantaranya lulusan D4/S1 ke atas.

3.4 Tingkat Partisipasi Sekolah

Untuk mengetahui capaian di bidang pendidikan salah satunya dengan melihat tingkat partisipasi sekolah penduduknya. Indikator yang digunakan untuk mengkaji tingkat partisipasi sekolah diantaranya adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka Partisipasi Sekolah merupakan ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS digunakan sebagai indikator dasar untuk melihat akses penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Semakin tinggi APS, maka semakin besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam bangku pendidikan.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia Sekolah (Persen), 2018 – 2021

Kelompok Umur	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7 – 12	100,00	100,00	99,70	99,09
13 – 15	93,09	93,47	94,22	96,97
16 – 18	76,78	77,84	78,70	77,96

Sumber: BPS - Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Secara umum, APS Kabupaten Trenggalek per masing-masing kelompok usia sekolah ditunjukkan pada Tabel 3.4. APS kelompok usia 7

– 12 tahun 2021 sebesar 99,09 yang berarti bahwa 99,09 persen penduduk Kabupaten Trenggalek usia 7 – 12 tahun mengenyam pendidikan di sekolah (tanpa memandang tingkatan sekolahnya). APS kelompok usia 13 – 15 tahun Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 96,97, lebih rendah dari APS kelompok usia SD (7 – 12 tahun). Artinya, dari penduduk Kabupaten Trenggalek yang berusia 13 – 15 tahun terdapat 96,97 persen yang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan di sekolah.

Sementara itu, APS kelompok usia SMA (16 – 18 tahun) Kabupaten Trenggalek tahun 2021 sebesar 77,96, sedikit lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 78,70. Angka ini lebih kecil dibandingkan APS kelompok usia SMP (13 – 15 tahun). Hal ini menunjukkan bahwa ada sekitar 22,04 persen penduduk Kabupaten Trenggalek usia 16-18 tahun yang tidak bersekolah/tidak melanjutkan lagi ke jenjang pendidikan SMA.



4. KETENAGAKERJAAN

Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat menjadi sasaran pembangunan ideal suatu daerah. Di sinilah letak isu pentingnya faktor ketenagakerjaan itu berperan dalam sebuah aktifitas bisnis dan perekonomian unggulan Kabupaten Trenggalek. Ketenagakerjaan masih menjadi permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk menerapkan strategi dan langkah tepat untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah. Tenaga kerja merupakan modal bagi geraknya roda pembangunan. Kondisi jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi. Oleh karena itu, data mengenai perkembangan ketenagakerjaan sangatlah penting bagi pemerintah terkait dalam pengambil kebijakan yang tepat sasaran.

Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan rasio antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja/usia produktif (15 tahun ke atas). Selain TPAK, dalam analisis angkatan kerja dikenal pula indikator untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran terbuka didefinisikan sebagai orang yang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk mereka yang baru mendapat kerja tetapi belum mulai bekerja.

4.1 Karakteristik Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek

Angka TPAK dan TPT bisa mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah serta besarnya persentase angkatan kerja yang termasuk dalam pengangguran. Idealnya, capaian hasil pembangunan suatu wilayah dikatakan tinggi apabila angka TPAK tinggi dan TPT yang rendah.

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 adalah 412.144 orang, turun sebanyak 17.191 orang dibanding tahun 2020. Penurunan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu setahun terakhir ini mempengaruhi peningkatan angka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Trenggalek pada kurun waktu tersebut. Pada tahun 2020, TPAK Kabupaten Trenggalek mencapai angka 75,72, sedangkan pada tahun 2021 sebesar 72,36. Secara umum, angka ini menunjukkan bahwa 72,36 persen penduduk Kabupaten Trenggalek yang berusia 15 tahun ke atas memutuskan untuk ikut aktif di pasar kerja pada

tahun 2021. Adapun sisanya sebesar 27,64 persen memutuskan untuk fokus sekolah, mengurus rumah tangga, maupun memiliki kegiatan di luar kegiatan ekonomi seperti kaum lanjut usia (lansia).

Tabel 4.1 Karakteristik Ketenagakerjaan di Kabupaten Trenggalek, 2017 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angkatan Kerja	416 509	407 820	429 335	412 144
• Bekerja	399 122	393 816	411 703	397 576
• Pengangguran	17 387	14 004	17 632	14 568
Bukan Angkatan Kerja	137 403	149 015	137 659	157 430
TPAK	75,19	73,24	75,72	72,36
TPT	4,17	3,43	4,11	3,53
Bekerja (%)	95,83	96,57	95,89	96,47

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Trenggalek mengalami penurunan, yaitu dari 4,11 pada tahun 2020 menjadi 3,53 pada tahun 2021. Kenaikan TPT pada tahun 2020 diduga karena adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan beberapa sektor perekonomian melemah sehingga berdampak pada pengurangan tenaga kerja.

Peningkatan pemahaman masyarakat akan perlunya pendidikan juga mempengaruhi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk memilih melanjutkan pendidikan dan menunda peran aktifnya di pasar kerja. Apalagi fenomena tersebut diiringi dengan semakin didorongnya program wajib belajar dan biaya pendidikan gratis yang ikut menjadi

faktor penunda bagi mereka yang sudah memasuki usia kerja untuk terjun ke pasar kerja.

4.2 Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Distribusi penduduk yang bekerja menurut lapangan usaha pada dibagi menjadi 3 sektor yaitu pertanian, manufaktur, dan jasa. Kelompok lapangan usaha pertanian meliputi sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, perburuan, dan perikanan. Kelompok lapangan usaha manufaktur meliputi pertambangan, penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air, pengelolaan sampah, daur ulang, dan bangunan. Adapun kelompok lapangan usaha jasa meliputi keseluruhan sektor jasa dan sektor yang belum masuk di kedua kelompok di atas.

Tabel 4.2 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2020

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian	48,48	47,15	42,61	43,46
Manufaktur	1,44	1,23	1,40	27,32
Jasa	13,81	14,70	15,66	29,22
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Secara umum, penduduk Kabupaten Trenggalek paling banyak bekerja di sektor pertanian, diikuti sektor jasa, dan manufaktur. Kondisi ini memiliki pola yang sama dari tahun 2018 – 2021. Penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai 2020 dan mengalami kenaikan pada tahun 2021. Sedangkan,

sektor jasa mengalami kenaikan hingga mencapai 29,22 persen di tahun 2021. Adapun persentase penduduk yang bekerja di sektor manufaktur berfluktuasi dari tahun 2018 sampai 2021.

Tabel 4.3 Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	15,45	17,73	18,50	21,50
Berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap atau pekerja tidak dibayar	30,49	24,65	26,20	22,39
Berusaha dengan dibantu buruh tetap atau pekerja dibayar	3,40	2,40	2,83	2,62
Karyawan/buruh/pegawai	23,06	24,41	22,18	24,01
Pekerja Bebas	7,87	9,51	6,17	5,83
Pekerja Tidak Dibayar	19,73	21,30	24,12	23,65
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Trenggalek

Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kabupaten Trenggalek yang bekerja dengan status karyawan / buruh / pegawai lebih besar dibandingkan status pekerjaan yang lain. Penduduk yang berusaha sendiri mengalami kenaikan sebesar 3 poin dari 18,50 persen di tahun 2020 menjadi 21,50 persen di tahun 2021. Namun sebaliknya pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar mengalami penurunan pada tahun 2021.



5. TARAF DAN POLA KONSUMSI

Pola konsumsi masyarakat menunjukkan suatu hasrat masyarakat untuk mengkonsumsi barang maupun jasa. Hasrat untuk mengkonsumsi dipengaruhi oleh seberapa besar pendapatan mereka yang dialokasikan untuk konsumsi. Bisa diartikan bahwa konsumsi seseorang berbanding lurus dengan pendapatannya, semakin besar pendapatan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Dengan kata lain, pola konsumsi menjadi indikator kesejahteraan rumah tangga.

Pola konsumsi dapat dikenali berdasarkan alokasi penggunaannya. Secara garis besar, alokasi pengeluaran konsumsi masyarakat digolongkan menjadi dua kelompok pengeluaran, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Struktur konsumsi masyarakat Jawa Timur mulai mengalami perkembangan, dimana sebagian besar pengeluaran konsumsinya tidak lagi untuk konsumsi makanan tetapi untuk konsumsi bukan makanan. Pergeseran pola konsumsi ini dipengaruhi oleh perubahan pendapatan seseorang. Semakin tinggi pendapatan, cenderung akan semakin tinggi pengeluaran untuk bukan makanan.

Pergeseran pola pengeluaran terjadi karena elastisitas permintaan terhadap makanan pada umumnya rendah, sebaliknya elastisitas permintaan terhadap barang bukan makanan pada umumnya tinggi. Keadaan ini jelas terlihat pada kelompok penduduk yang tingkat konsumsi

makanannya sudah mencapai titik jenuh, sehingga peningkatan pendapatan akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan bukan makanan atau ditabung.

5.1 Rata-rata Pengeluaran Per Kapita

Gambaran konsumsi masyarakat Kabupaten Trenggalek dapat dilihat pada Tabel 5.1. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Trenggalek meningkat dari Rp823.510,- pada tahun 2019 menjadi Rp 863.725,- pada tahun 2020. Pada tahun 2019, 49,33 persen pengeluaran masyarakat Kabupaten Trenggalek digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan 50,67 persen sisanya dikeluarkan untuk konsumsi bukan makanan. Pada tahun 2020, sebanyak 49,07 persen atau sekitar Rp423.843,- dikeluarkan penduduk Kabupaten Trenggalek untuk konsumsi makanan dan Rp439.882,- atau sekitar 50,93 persen untuk konsumsi bukan makanan. Dilihat dari proporsi tersebut, pengeluaran untuk bukan makanan mengalami peningkatan dan pengeluaran makanan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi penghasilan masyarakat Kabupaten Trenggalek, sehingga semakin besar proporsi pengeluaran untuk non makanan.

Tabel 5.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Trenggalek, 2020 – 2021

Uraian	2020		2021	
	Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)	Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Makanan	423 843	49,07	418 705	52,92
- Padi-padian	57 918	6,71	61 520	7,78
- Umbi-umbian	3 953	0,46	4 540	0,57
- Ikan	27 127	3,14	28 160	3,56
- Daging	14 580	1,69	13 809	1,75
- Telur dan Susu	25 800	2,99	23 456	2,96
- Sayur-sayuran	36 012	4,17	49 855	6,30
- Kacang-kacangan	9 912	1,15	12 236	1,55
- Buah-buahan	26 992	3,13	16 720	2,11
- Minyak dan Lemak	17 493	2,03	19 155	2,42
- Bahan Minuman	15 326	1,77	15 076	1,91
- Bumbu-bumbuan	6 562	0,76	7 933	1,00
- Konsumsi Lainnya	5 253	0,61	6 483	0,82
- Makanan dan Minuman Jadi	134 209	15,54	117 838	14,89
- Tembakau dan Sirih	42 708	4,94	41 926	5,30
Non Makanan	439 882	50,93	372 534	47,08
- Perumahan, bahan bakar, penerangan, air	178 760	20,70	175 184	22,14
- Aneka barang dan jasa	108 778	12,59	85 415	10,80
- Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala	26 581	3,08	19 184	2,42
- Barang yang tahan lama	79 702	9,23	52 051	6,58
- Pajak pemakaian dan premi asuransi	27 976	3,24	26 875	3,40
- Keperluan pesta dan upacara	18 086	2,09	13 824	1,75
Jumlah	863 725	100,00	791 239	100,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2021, 2022

Jika ditinjau menurut jenis pengeluaran, pengeluaran terbesar masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 digunakan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman jadi yaitu sebesar 14,89 persen terhadap total pengeluaran. Persentase ini menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 15,54 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa penduduk Trenggalek cenderung lebih suka makan dan minum hasil olahan sendiri daripada membeli makanan dan minuman jadi. Bila dilihat dari pengeluaran pada kelompok bukan makanan, pengeluaran untuk perumahan, bahan bakar, penerangan, dan air memberikan kontribusi yang besar baik pada tahun 2020 maupun tahun 2021.



6. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN

Salah satu kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia adalah adanya tempat tinggal. Selain menjadi kebutuhan yang mendasar, tempat tinggal juga merupakan faktor penentu indikator kesejahteraan rakyat. Rumah sebagai tempat tinggal juga mempunyai pengaruh terhadap produktivitas kerja seseorang karena selain sebagai hunian juga berfungsi sebagai tempat pusat pendidikan, pembinaan keluarga, dan peningkatan kualitas generasi yang akan datang. Keadaan perumahan yang baik dapat menunjang usaha pembangunan ekonomi karena dengan kualitas kehidupan yang layak melalui pemenuhan kebutuhan tempat tinggal maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman menyebutkan bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya perumahan dan kawasan permukiman yaitu untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Definisi perumahan sendiri merupakan kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan fasilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah layak huni.

Status sosial seseorang juga dapat ditunjukkan melalui kualitas atau kondisi rumah. Semakin tinggi status sosial seseorang semakin besar

peluang untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal dengan kualitas yang lebih baik. Salah satu fasilitas perumahan yang dapat mencerminkan kesejahteraan adalah kualitas material seperti jenis atap, dinding, dan lantai terluas yang digunakan. Selain itu, perumahan yang baik juga memenuhi fasilitas penunjang lain yang meliputi luas lantai hunian, sumber air minum, fasilitas tempat buang air besar dan sumber penerangan.

6.1 Kualitas Tempat Tinggal

Secara umum, rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal seperti memiliki lantai, dinding dan atap yang memenuhi syarat, serta mempunyai luas lantai yang mencukupi/sebanding dengan banyaknya orang yang tinggal di dalamnya, termasuk fasilitas penerangan, air minum dan tempat pembuangan akhir/tinja. Selain itu, kualitas bangunan tempat tinggal dapat mencerminkan kondisi sosial ekonomi dari penghuninya. Rumah dengan bangunan yang kualitasnya baik tentunya kondisi ekonominya juga lebih baik dibandingkan mereka yang menempati rumah dengan kualitas bangunan yang rendah.

Tabel 6.1 Persentase Rumah tangga Menurut Beberapa Indikator Kualitas Perumahan di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Indikator Kualitas Perumahan	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Lantai Bukan Tanah	93,46	92,03	94,33	93,32
Atap Beton, Genteng, Asbes dan Seng	99,85	99,73	99,15	99,44
Dinding Terluas Tembok dan Kayu	97,70	96,97	93,23	97,28

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Persentase rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang menggunakan bukan tanah pada tahun 2021 menunjukkan penurunan menjadi sebesar 93,32 persen dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 94,33 persen. Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kualitas rumah tinggal adalah penggunaan atap dan dinding terluas. Kualitas perumahan di Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 mengalami kenaikan baik dari sisi atap maupun dinding terluas yang digunakan. Pada tahun 2018, rumah dengan atap beton, genteng, seng, dan asbes di Trenggalek sebesar 99,85 persen. Angka ini terus menurun sampai pada tahun 2020 menjadi sebesar 99,15 persen, sedangkan pada tahun 2021 naik sebesar 99,44 persen. Kondisi yang cenderung menurun juga terjadi pada indikator dinding terluas tembok dan kayu yaitu sebesar 97,70 persen pada tahun 2018, menurun menjadi 96,97 persen di tahun 2019 dan 93,23 persen di tahun 2020 tetapi di tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 97,28 persen.

6.2 Fasilitas Tempat Tinggal

Fasilitas tempat tinggal seperti ketersediaan air bersih, sanitasi yang layak, dan penerangan yang baik merupakan faktor yang menentukan kualitas dan kenyamanan rumah tinggal. Salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari adalah air, sehingga ketersediaan dalam jumlah yang cukup terutama untuk keperluan dikonsumsi dan sanitasi merupakan tujuan dari program penyediaan air bersih yang terus menerus diupayakan pemerintah.

Fasilitas perumahan yang cukup penting peranannya dalam sanitasi adalah penyediaan sarana jamban. Jika dilihat dari segi kesehatan lingkungan dan masyarakat, masalah pembuangan kotoran manusia dapat mencemari lingkungan terutama tanah dan sumber air. Oleh karena itu, pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik sesuai dengan ketentuan jamban yang sehat. Hal ini dapat dilihat dari ketersediaan jamban sendiri dengan tangki septik.

Tabel 6.2 Persentase Rumah Tangga Menurut Indikator Fasilitas Perumahan di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Indikator Fasilitas Perumahan	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Air kemasan, air isi ulang, leding	16,17	15,11	20,87	16,16
Tempat buang air besar sendiri	75,56	78,28	85,44	86,29
Tempat buang air besar dengan tangki septik	78,27	77,52	81,65	79,14
Sumber penerangan listrik	100,00	100,00	99,95	99,82

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Pada tahun 2021, penggunaan sumber air minum dan masak yang menggunakan air kemasan, air isi ulang, dan air leding mengalami

penurunan dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 16,12 persen dari total rumah tangga di Kabupaten Trenggalek. Sementara itu, 83,88 persen lainnya masih menggunakan sumur dan sumber mata air lainnya. Kesadaran masyarakat Kabupaten Trenggalek pada tahun 2021 dalam mengonsumsi air yang bersih dan terlindungi menurun dibandingkan pada tahun 2020.

Persentase rumah tangga yang menggunakan jamban sendiri mengalami kenaikan dari tahun 2018 – 2021. Adapun rumah tangga dengan tangki septik sudah mencapai 81,65 persen pada tahun 2020 dan mengalami penurunan di tahun 2021 sebesar 79,14 persen.

Sumber penerangan merupakan fasilitas perumahan yang penting. Sumber penerangan yang ideal adalah yang berasal dari listrik (PLN dan non PLN), karena cahaya listrik lebih terang dibanding sumber penerangan lainnya. Rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang telah menikmati fasilitas penerangan listrik tahun 2021 sebanyak 99,82 persen. Walaupun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini masih lebih baik dari Jawa Timur secara umum yang pada tahun 2021 mencapai 99,51 persen.

6.3 Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Tingkat kesejahteraan dan peningkatan taraf hidup masyarakat dapat dilihat melalui status kepemilikan tempat tinggal. Kondisi ekonomi rumah tangga sangat berpengaruh terhadap kepemilikan tempat tinggal. Rumah tangga yang menempati rumah milik sendiri akan lebih tenang dibandingkan mereka yang menempati rumah sewa apalagi yang bebas

sewa karena telah mampu memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal yang terjamin dan permanen dalam jangka panjang.

Tabel 6.3 Persentase Rumah tangga Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Status Kepemilikan Tempat Tinggal	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Milik Sendiri	95,40	97,18	94,98	96,20
Kontrak/Sewa	0,59	0,95	0,29	0,20
Bebas Sewa	3,44	1,87	4,73	3,60
Dinas	0,13	0,00	0,00	0,00
Lainnya	0,45	0,00	0,00	0,00
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018-2021

Berdasarkan Tabel 6.3, rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang menempati rumah milik sendiri sebesar 96,20 persen dan sisanya sebesar 3,8 persen adalah bukan milik sendiri. Rumah tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri terdiri dari kontrak/sewa sebesar 0,20 persen, dan bebas sewa sebesar 3,6 persen. Kepemilikan rumah tinggal milik sendiri tahun 2021 mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang sebesar 94,98 persen.



7. KEMISKINAN

Kemiskinan merupakan suatu keadaan di mana seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai *the last, the least, the lowest, and the loss*. Pada dasarnya, kemiskinan berhubungan dengan kurangnya akses seseorang terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kemiskinan telah menjadi masalah klasik yang dialami oleh setiap negara. Permasalahan ini harus dilihat dari berbagai aspek karena kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang tidak hanya berhubungan dengan kondisi ekonomi, tetapi juga berhubungan dengan sosial dan budaya.

Penanggulangan kemiskinan menjadi salah satu agenda penting di setiap negara. Di Indonesia, tiap era kepemimpinan memiliki program khusus untuk pengentasan kemiskinan. Pada masa orde baru digalakkan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang bertujuan menanggulangi permasalahan ketersediaan infrastruktur di desa-desa yang relatif belum maju. Pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono dibentuk Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk menyelaraskan berbagai kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, masa kepemimpinan Joko Widodo juga menempatkan pengentasan kemiskinan sebagai salah satu fokus utama pemerintah sebagaimana tertuang dalam sembilan agenda

prioritas Nawacita yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, peningkatan layanan kesehatan masyarakat, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Trenggalek

Kemiskinan merupakan permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistemik, terpadu, dan menyeluruh. Dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga negara, diperlukan langkah-langkah strategis dan komprehensif (TNP2K, 2014). Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah melakukan berbagai upaya untuk mengurangi angka kemiskinan di Trenggalek. Pemerintah terus meningkatkan dan menyempurnakan berbagai program penanggulangan kemiskinan, terutama program Gertak dan meningkatkan kemampuan dan pendapatan rumah tangga miskin melalui kemudahan akses modal.

Tabel 7.1 Perkembangan Penduduk Miskin di Kabupaten Trenggalek, 2017 – 2021

Tahun	Penduduk	Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)
2018	694 902	83 500	12,02
2019	696 295	76 440	10,98
2020	697 600	81 060	11,62
2021	734 888	84 890	12,14

Sumber: BPS - Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2017-2021

Selama tahun 2018 – 2019, persentase penduduk miskin di Kabupaten Trenggalek cenderung menurun seiring banyaknya program pengentasan kemiskinan yang digalakkan oleh pemerintah. Pada tahun 2020-2021, penduduk miskin Kabupaten Trenggalek kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 11,62 persen di tahun 2020 dan 12,14 persen di tahun 2021. Hal ini diduga karena adanya efek dari pandemi Covid 19. Jika dilihat dari jumlahnya, penduduk miskin pada tahun 2021 sebanyak 84.890 jiwa.

7.2 Karakteristik Kemiskinan

Kemiskinan harus dipandang secara luas agar dalam implementasi kebijakannya dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Kemiskinan bukan hanya persoalan banyaknya penduduk miskin, tetapi juga seberapa besar jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan (tingkat kedalaman) yang disebut sebagai P1, serta keragaman pengeluaran antar penduduk miskin (tingkat keparahan) yang disebut P2.

Karakteristik rumah tangga miskin dapat dilihat dari kondisi pendidikan dan ketenagakerjaan dari anggota rumah tangga, serta kondisi perumahan rumah tangga. Pemahaman mengenai karakteristik rumah tangga miskin penting sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program pengentasan kemiskinan agar lebih tepat sasaran.

Garis Kemiskinan merupakan batas yang digunakan untuk pengelompokan penduduk miskin dan tidak miskin. Penghitungan garis kemiskinan dilakukan terpisah antara daerah perkotaan dan perdesaan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan per kapita di bawah garis kemiskinan.

Tabel 7.2 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1), dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Trenggalek, 2018 - 2021

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(4)	(5)	(6)	
Garis Kemiskinan (Rupiah)	308 644	323 787	340 915	358 831
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	1,85	1,37	1,48	1,46
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)	0,42	0,30	0,31	0,25

Sumber: BPS - Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota Tahun 2018-2021

Garis kemiskinan Kabupaten Trenggalek mengalami peningkatan selama 2018 – 2021. Pada tahun 2018, garis kemiskinan Kabupaten Trenggalek sebesar Rp308.644,- dan terus meningkat hingga mencapai Rp358.831,- pada tahun 2021.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Trenggalek belfluktuasi selama tahun 2018 – 2021. Pada tahun 2018, indeks kedalaman kemiskinan mencapai 1,85, kemudian mengalami penurunan menjadi 1,37 pada 2019. P1 meningkat pada tahun berikutnya hingga mencapai 1,48 di tahun 2020. Pada tahun 2021, P1 mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 1,46. Penurunan P1 menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin dekat.

Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Trenggalek juga berfluktuasi dari tahun 2018 – 2021. Pada tahun 2018, indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Trenggalek sebesar 0,42 dan berfluktuasi hingga mencapai 0,25 pada tahun 2021. Nilai P2 yang cenderung menurun menandakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin semakin sempit.

<https://trenggalekkab.bps.go.id>



8. SOSIAL LAINNYA

8.1 Akses Teknologi Informasi dan Komunikasi

Hal yang tak kalah menarik untuk mengetahui seberapa jauh perkembangan kesejahteraan rakyat dengan melihat penguasaan/ kepemilikan akses teknologi informasi dan komunikasi. Di abad ke 20 ini, kemajuan teknologi informasi berkembang cepat. Era penggunaan telepon sudah bergeser ke *handphone* (HP). Bagi masyarakat sekarang, HP lebih praktis dan ekonomis dibanding telepon. Memiliki HP tidak memerlukan biaya pemasangan dan tidak tergantung adanya sarana kabel telepon. Cukup dengan tower signal, penggunaan HP bisa dilakukan di mana saja. Di samping itu, pembelian pulsa HP bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan masing-masing individu. Bahkan hanya dengan perangkat HP, siapapun bisa melakukan akses internet dengan tujuan yang lebih luas.

Tabel 8.1 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki/Menguasai Alat Komunikasi dan Informasi Menurut Jenis Alat Komunikasi di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2020

Uraian	2018	2019	2020	2021
(1)	(3)	(4)	(5)	
Telepon rumah/PSTN	0,68	0,38	0,39	0,51
Ponsel/Telepon seluler	86,61	86,51	89,03	88,60
Komputer/Laptop	15,52	14,77	13,25	16,27

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2018-2021

Kepopuleran HP dibandingkan dengan telepon terlihat dari Tabel 8.1. Rumah tangga yang memiliki/menguasai telepon di rumah pada tahun 2021 tercatat sebesar 0,51 persen. Kondisi ini berbeda jauh dengan rumah tangga yang memiliki/menguasai HP yang mencapai lebih dari 88 persen. Rumah tangga yang menggunakan HP merasa cukup terbantu dibanding yang menggunakan telepon. Berbagai aplikasi yang ditawarkan oleh perusahaan komunikasi selular menjadikan HP sebagai alat komunikasi yang paling diminati di kalangan masyarakat. Dengan memanfaatkan aplikasi HP, masyarakat bisa melakukan komunikasi lewat media sosial yang tidak bisa dinikmati pengguna telepon biasa. Kelebihan lainnya, untuk daerah-daerah terpencil yang tidak mempunyai jaringan telepon rumah, masyarakat bisa melakukan komunikasi melalui HP berkat adanya tower pemancar jaringan di daerah tersebut.

Sementara, dari seluruh rumah tangga di Kabupaten Trenggalek, rumah tangga yang memiliki/menguasai alat informasi berupa komputer atau laptop di tahun 2021 tercatat sebesar 16,27 persen. Beberapa rumah tangga memanfaatkan komputer dan laptop sebagai sarana penunjang pendidikan dan mengembangkan bisnis (hasil usaha). Berbagai produk usaha dapat dipasarkan dengan menggunakan komputer dan laptop yang terhubung jaringan internet sehingga memunculkan pasar online. Pendek kata, penggunaan alat komunikasi dan informasi semakin diperlukan dan berkembang di tengah masyarakat Kabupaten Trenggalek.

8.2 Kredit Usaha dan Program Perlindungan Sosial

Untuk meningkatkan produktivitas usaha masyarakat, berbagai

kredit usaha tersedia baik dari pemerintah maupun swasta. Bahkan untuk mendukung usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah mengeluarkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan prosedur yang mudah dan bunga yang relatif murah. Minimnya pengetahuan dan sosialisasi tentang kredit usaha mengakibatkan banyaknya masyarakat yang terjebak pada rentenir dan sistem ijon. Hal ini menyebabkan rumah tangga yang memanfaatkan kredit usaha tidak begitu banyak.

Dalam menjalankan aktifitasnya, banyak rumah tangga di Kabupaten Trenggalek yang menerima kredit usaha dari berbagai pihak, pemerintah dan swasta. Pada tahun 2021, program KUR merupakan jenis kredit usaha terbanyak yaitu sebesar 8,49 persen, diikuti program koperasi sebesar 4,17 persen, dan program bank selain KUR sebesar 3,60 persen.

Tabel 8.2. Persentase Rumah Tangga Penerima Kredit Usaha Menurut Jenis Kredit Usaha di Kabupaten Trenggalek, 2018 – 2021

Jenis Kredit Usaha	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KUR	6,01	6,18	7,32	8,49
Program Bank Selain KUR	7,27	3,11	8,10	3,60
KUBE / KUB	1,03	0,9	0,29	0,15
Program Koperasi	5,09	4,78	3,79	4,17
Perorangan (Dengan Bunga)	1,02	0,27	0,58	0,83
Lainnya	8,65	12,6	4,34	0,90

Sumber: BPS, Statistik Kesejahteraan Rakyat Provinsi Jawa Timur, 2018-2021

Cukup tingginya persentase penduduk yang menerima KUR dan

program bank selain KUR menunjukkan bahwa program sosialisasi sudah cukup berhasil. Program KUR mampu menjaring pengguna kredit terutama dari usaha mikro, kecil, dan menengah. Dengan adanya informasi yang jelas, program KUR menjadi salah satu tujuan utama kredit usaha rakyat dibandingkan dengan sumber kredit lainnya.

Kemudahan memperoleh kredit harus selalu diupayakan baik oleh pemerintah maupun pihak perbankan demi memajukan ekonomi masyarakat. Selain adanya program kredit usaha, pemerintah juga terus mengupayakan kesejahteraan rakyat melalui berbagai program perlindungan sosial antara lain Program Indonesia Pintar (PIP), Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KABUPATEN TRENGGALEK**

Jl. Brigjend Soetran, Trenggalek 66310

Telp. (0355) 791432, Faks (0355) 791432

Homepage : <http://trenggalekkab.bps.go.id>

Mailbox : bps3503@bps.go.id